

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan merupakan bagian dari pajak daerah yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis dan Pembahasan yang sudah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kota Surabaya memiliki realisasi penerimaan pajak dari sektor hotel yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya dan secara langsung mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun juga tercapai jumlahnya meskipun pada tahun 2015 realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target dikarenakan wajib pajak hotel jumlahnya 850, dan terkadang tidak membar pajak tepat waktu, selain itu realisasi penerimaan pajak dari sektor restoran juga cukup besar dan meningkat setiap tahun dan target yang ditetapkan selalu tercapai jumlahnya dikarenakan wajib pajak restoran sangat banyak jumlahnya yaitu 2.655, jadi meskipun terkadang ada wajib pajak yang menunggak tetap tidak mempengaruhi target penerimaan pajak restoran, dan yang terakhir realisasi penerimaan pajak hiburan juga cukup besar dan meningkat setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2015 realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target dikarenakan jumlah wajib pajak hiburan tidak terlalu banyak yaitu 399 dan wajib pajak sering kali tidak membayar tepat waktu hal itu bisa mempengaruhi target penerimaan pajak hiburan.
2. Kontribusi pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong sangat kurang. Hal ini berarti bahwa sumbangan yang diberikan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan masih sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan masih sangat kurang disebabkan oleh, adanya Wajib Pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya, adanya calon Wajib Pajak baru yang belum terdaftar.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu:

Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah tidak bisa memberikan data mengenai Daftar Nama-nama Hotel, Restoran, Dan Hiburan karena bersifat rahasia.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka sebagai bahan pertimbangan agar penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan dapat lebih dimaksimalkan, maka akan diberikan saran sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan masih sangat kurang sehingga adanya pengelolaan keuangan dan pajak daerah perlu melakukan sosialisasi dan perlu menegakkan aturan dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pajak dan Retribusi Daerah. *Pajak Hotel*. Didapatkan dari <https://bprd.jakarta.go.id/pajak-hotel/>
- Badan Pajak dan Retribusi Daerah. *Pajak Restoran*. Didapatkan dari <https://bprd.jakarta.go.id/pajak-restoran/>
- Badan Pajak dan Retribusi Daerah. *Pajak Restoran*. Didapatkan dari <https://bprd.jakarta.go.id/pajak-hiburan-2/>
- Lamia, A.,A., Saerang, D.,P.,E dan Wokas, H.,R.,N. (2015) . Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 15(5)
- Nini, Adli,M.F. (2018).Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoranterhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Padang Periode 2012-2016 (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang). *Jurnal Menara Ilmu*. Vol 12(11)
- Nazir. 2014. MetodePenelitian. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Puspitasari,D.A . *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012-2014*
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Hotel
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Hiburan
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011Tentang Restoran
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah
- Republik Indonesia. 2004, Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia . 2007. Undang-Undang Nomor 28 tahun Tahun 2007 tentang Pajak

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Yin, Robert K. (2015). Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.